DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

1. Abdurrahman, *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Pembebasan Tanah Di Indonesia,*(Bandung : Penerbit Alumni,1983).
2. Ali Chidir, *Himpunan Peraturan Hukum Agraria,* (Jakarta : Binacipta,1980).
3. Boedi Harsono, *Hukum Agraia Indonesia*, : sejarah pembentukan undang-undang pokok Agraria, isi dan Pelaksanaanya (Jakarta: Djambatan, 2008).
4. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta : Balai pustaka, 1994).
5. Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Inonesia, 1998).
6. Ronny Honitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta ; Ghalia Indonesia, 1998).
7. Soedjarwo Soeromihardjo, *Mengikuti UUPA meretas jalan menuju penataan kembali Politik Agraria Nasional,* (Jakarta : Cerdas Pustaka, 2009).
8. Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).
9. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Presiden, 1985).
10. Soetandyo Wignosoebroto, *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, (Jakarta : ELSA dan HUMA, 2002).

11. Suandra I Wayan, *Hukum Pertanahan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).
12. Sudargo Gautama, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria* , (Bandung : PT. Aditya Bakti, 1990).
13. Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* , (Bandung : ALFABETA, 2008).
14. Warman Abdullah, *Pengadaan di Wilayah Provinsi Jambi*, (Jambi : Singgalang, 2006).
15. Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tekhnik*, (Bandung : Tarsito, 1994).

B. Peraturan Perundang-Undangan

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah Dan Benda-benda yang ada di atasnya.
e. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
f. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Penetapan ganti kerugian

g. Inpres Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencabutan Hak-hak Atas tanah Dan Benda-benda Yang Ada Di atasnya.

h. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 junto Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.